

IKU

DINAS PERIKANAN

TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PERIKANAN

TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT DINAS PERIKANAN

Jl. Letkol Pol. Tugino No. – Kuala Tungkal 36513 Tlp/Fax (0742) 21023
Email : diskan.tanjabbarkab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomo 52 tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tanjung Jabung Barat, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Tahun 2021 – 2026;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonsia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERIKANAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021;

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan yang digunakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja

KETIGA : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

KEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada Tanggal September 2021

KEPALA DINAS



Ir. NETTY MARTINI, M.Sc.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650913 199703 2 001

KATA PENGANTAR

Dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi di dinas, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2021 dengan maksud dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi Pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi.

Dokumen ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Diharapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2020 ini dapat digunakan sebagai acuan dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.

Kuala Tungkal, September 2021

KEPALA DINAS



Ir. NETTY MARTINI, M.Sc.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650913 199703 2 001

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	2
BAB II. PENETAPAN INDIKATOR KERJA UTAMA	4
BAB III. GAMBARAN UMUM	6
3.1. Visi dan Misi.....	6
3.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	15
3.3. Program dan Kegiatan	24
BAB IV. PENUTUP	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan umum pemerintah mengacu kepada pembangunan yang *good governance*, dimana dalam menjalankan pemerintahan berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Pelaksanaan pemerintahan berupaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output adalah hasil langsung dari program-program atau kegiatan-kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. *Output* dan *Outcome* inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja. Bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini. Namun demikian uang tetap merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja tertentu, karena itu prinsip dasar manajemen berbasis kinerja adalah *no performance, no money*.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka upaya mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented goverment*, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat UU. No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan dibawahnya. Dengan demikian, kedepan anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan (level) secara berjenjang. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada unit organisasi setingkat Eselon II/Organisasi Pemerintah/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output). Dengan ditetapkannya indikator kinerja utama secara formal dalam suatu lembaga pemerintah, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya

ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) landasan hukum yang digunakan :

- a. Landasan Idiil yaitu Pancasila;
- b. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945;
- c. Landasan Operasional, yaitu :
 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4);

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2021 adalah untuk memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan dinas sebagai penjabaran dari visi, misi dan sasaran strategis Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun Anggaran 2021 ini adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II.

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam Penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan untuk mengukur dan meningkatkan kinerja sejauh mana keberhasilan pelaksanaan dokumen perencanaan tersebut. Kriteria dokumen perencanaan yang baik adalah jika dokumen tersebut dapat dievaluasi sejauh mana keberhasilannya. Evaluasi keberhasilan tersebut hanya dapat dilakukan jika dalam dokumen perencanaan telah dilengkapi dengan seperangkat indikator kinerja yang akan mengukur capaian pelaksanaan perencanaan.

Dalam perencanaan kinerja tahunan, maka IKU ini akan menjadi pemandu dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu. Dengan demikian setiap tahunnya, suatu instansi pemerintah harus merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan. Selanjutnya program dan kegiatan yang telah direncanakan tersebut yang harus diajukan usulan anggarannya dalam dokumen RKA-OPD. Dengan pendekatan ini maka diperoleh beberapa manfaat, yaitu:

- Program dan kegiatan yang dilaksanakan suatu instansi pemerintah akan terkait langsung dengan ukuran keberhasilan instansi tersebut yang merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi instansi.
- Terdapat keselarasan antara indikator kinerja kegiatan dengan IKU instansi yang bersangkutan.
- Anggaran hanya dipergunakan untuk program dan kegiatan yang memang akan mendukung keberhasilan instansi dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi.

Setelah pelaksanaan program dan kegiatan, maka dilakukan pengukuran berdasarkan IKU yang telah ditetapkan tersebut. Hasil pengukuran ini selanjutnya dituangkan dalam laporan kinerja instansi yang bersangkutan serta sebagai dasar pelaksanaan evaluasi kinerja untuk mewujudkan perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Berdasarkan Sasaran Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

1. Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Nilai Tukar Usaha Perikanan (NTUP).
3. Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan (AKI) Daerah.

BAB III GAMBARAN UMUM

3.1. Visi dan Misi

3.1.1. Visi

Visi merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai. Visi pembangunan perikanan merupakan koridor utama yang mengawal kesinergisan dan perjalanan sektor perikanan menuju kondisi yang dicita-citakan. Sebagai bagian dari perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Barat, visi sektor perikanan selayaknya dapat menjadi penggenap visi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Misi adalah ungkapan eksistensi sebuah organisasi yang dijabarkan dalam bentuk rangkaian kalimat dalam rangka mencapai visi. Telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Visi :

“Menuju Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH”
(Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)

Adapun makna yang terkandung dalam visi yang sudah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut:

VISI	TERJEMAHAN VISI
Berkualitas	Sumber daya manusia berdaya saing, sehat, dan inovatif agar dapat memberikan perubahan, perkembangan, dan kemajuan bagi daerah
Ekonomi Maju	Meningkatnya dan berkembangnya aktivitas perekonomian daerah dengan memaksimalkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, perkembangan, dan pemerataan perekonomian berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup
Religius	Berlandaskan nilai-nilai agama dalam tatanan penyelenggaraan pemerintah bagi aparatur, dan tatanan kehidupan bagi masyarakat
Kompetitif	Mampu bersaing dalam kancah perdagangan regional, nasional, dan internasional, dengan mengedepankan sumberdaya unggulan daerah
Aman	Suasana aman dan tertib sehingga masyarakat nyaman dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari, dan tercipta iklim yang kondusif untuk investasi.
Harmonis	Terjalin kerukunan antar umat beragama, dan terjalin hubungan baik dengan dunia usaha, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten tetangga, dan pemerintah pusat.

3.1.2. Misi

Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang telah ditetapkan berdasarkan visi tersebut dapat dilihat dalam Tabel sebagai berikut:

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berilmu dan Berakhlak	Menjadikan Masyarakat yang Berdaya Saing Dilandasi Iman dan Taqwa serta Berakhlak Mulia	1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia
2.	Mewujudkan Kondisi Sosial yang Tentram, Tertib dan Demokratis	Terwujudnya suasana kehidupan yang tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat, dan kelompok	1. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat 2. Terjaganya kelestarian, nilai kejujuran, dan pengembangan budaya daerah
3.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

	pelayanan publik	Efektif, Efisien dan Akuntabel	2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 3. Meningkatnya kinerja perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan dan aset daerah
4.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan	Pertumbuhan ekonomi kabupaten yang berkelanjutan	1. Meningkatnya perekonomian kabupaten 2. Terjaganya kelestarian lingkungan hidup
5.	Pemerataan Pembangunan daerah dari Desa sampai Kota	Mengurangi Kesenjangan Pembangunan Desa dan Kota	1. Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat 2. Menguatnya konektivitas dari desa sampai kota, dan daerah perbatasan

Berlandaskan visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 maka Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang bersinergi dan mendukung visi misi Kepala Daerah. Adapun tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan secara terperinci dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

NO	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN
1.	<i>MISI 3 :</i> Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	✓ Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
2.	<i>MISI 4 :</i> Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan	Pertumbuhan ekonomi kabupaten yang berkelanjutan	✓ Meningkatkan Perekonomian Kabupaten

Berdasarkan telaah visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 tersebut, maka Dinas Perikanan menekankan program dan kegiatan guna mendukung arah pembangunan kabupaten tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.1.3. Tujuan dan Sasaran

3.1.3.1. Tujuan Pembangunan Daerah

Tujuan dan sasaran RPJMD ditindaklanjuti kedalam tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terkait dengan

pencapaian misi ketiga dari RPJMD Kabupaten, yaitu **Peningkatan tata Kelola Pemerintahan yang Baik** dan Misi keempat dari RPJMD Kabupaten, yaitu **Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan**.

Indikator tujuan RPJMD dari misi ketiga adalah terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel dan misi keempat adalah pertumbuhan ekonomi Kabupaten yang Berkelanjutan. Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendukung sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Meningkatnya Perekonomian Kabupaten dengan indikator sasaran adalah :

1. Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah
2. Indeks Nilai Tukar Usaha Perikanan (NTUP)
3. Indeks Nilai Angka Konsumsi Ikan (AKI) Daerah (Kg/Kpt/Thn)

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.

Tujuan Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah “Terselenggaranya Tata Kelola Perangkat Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel serta Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perikanan Berbasis Optimalisasi Sumberdaya dan Pemberdayaan Masyarakat”.

Penjelasan dari tujuan Dinas Perikanan selama 5 (lima) Tahun dapat diuraikan dalam Tabel sebagai berikut :

Tujuan		Penjelasan
Urusan Pilihan : Kelautan dan Perikanan		
T.1	Terselenggaranya tata kelola Perangkat daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu sasaran yang dapat menjadi tolak ukur adalah Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat daerah. Adapun Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Dalam konteks ini sasaran pengukuran adalah keuangan dan non keuangan. Akuntabilitas publik sesuai dengan karakteristik <i>good governance</i> berkenaan dengan (1) <i>participation</i> ; (2) <i>rule of law</i> ; (3) <i>transparency</i> ; (4) <i>responsiveness</i> ; (5) <i>consensus orientation</i> ; (6) <i>equity</i> ; (7) <i>effectiveness and efficiency</i> ; dan (8) <i>strategy vision</i> .

T.2	Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perikanan Berbasis Optimalisasi Sumberdaya dan Pemberdayaan Masyarakat	<p>Perikanan merupakan sub sektor yang penting, yaitu sebagai sumber pendapatan dan kesempatan kerja serta menarik perhatian dalam hal efisiensi dan distribusi. Masalah efisiensi dikaitkan dengan jumlah persediaan (stock) ikan yang terus terancam punah dan masalah distribusi berkaitan dengan siapa yang akan memperoleh manfaat. Namun demikian subsektor ini di negara-negara berkembang seperti Indonesia belum mengalami perkembangan sebagaimana mestinya, sehingga campur tangan pemerintah diperlukan dalam rangka meningkatkan pendapatan nelayan atau petani ikan, perbaikan gizi rakyat dan peningkatan ekspor serta memanfaatkan 200 mil Zona Ekonomi Eksklusif. Sub sektor perikanan yaitu meliputi semua kegiatan penangkapan, pembenihan dan budidaya segala jenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada di air tawar maupun yang di air asin.</p> <p>Sektor perikanan memberikan harapan untuk menjamin kelangsungan hidup manusia masa kini dan masa yang akan datang. Perikanan merupakan satu bagian dari kegiatan ekonomi yang memberikan harapan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia melalui berbagai usaha yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nelayan dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan hidup yang lebih baik. Dalam rangka mencapai tujuan pokok pembangunan perikanan.</p>
-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adapun sasaran dari tujuan adalah Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Meningkatnya Usaha Perikanan yang Mandiri dan Berkelanjutan. Adapun tujuan, sasaran dan Indikator Sasaran jangka menengah Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	
Urusan Pilihan : Kelautan dan Perikanan					
T.1	Terselenggaranya tata kelola Perangkat daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	S.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	S.1.1.	Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah
T.2	Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perikanan Berbasis Optimalisasi Sumberdaya dan Pemberdayaan Masyarakat	S.2	Meningkatnya Usaha Perikanan yang Mandiri dan Berkelanjutan	S.1.2.	Nilai Tukar Usaha Perikanan (NTUP)
				S.1.3.	Nilai Angka Konsumsi Ikan (AKI) Daerah (Kg/Kpt/Thn)

Tujuan, sasaran dan indikator sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut di atas bertujuan untuk menunjukkan keterkaitan masing-masing komponen. Linieritas tersebut kemudian diturunkan pada sasaran, indikator sasaran, program, indikator program, dan indikator kegiatan. Hal tersebut bertujuan untuk melihat hirarki kinerja Dinas Perikanan termasuk dalam struktur jabatan (*eselon*), sehingga dapat diketahui tanggung jawab masing-masing *eselon*. Penjabaran tersebut memberikan kemudahan Dinas Perikanan dalam menyusun perjanjian kinerja, dan komponen lainnya dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kerangka keterkaitan tersebut disajikan dalam pohon kinerja sebagai berikut :

Pohon Kinerja Sasaran Sektor Kelautan dan Perikanan
Bidang Perikanan Tangkap

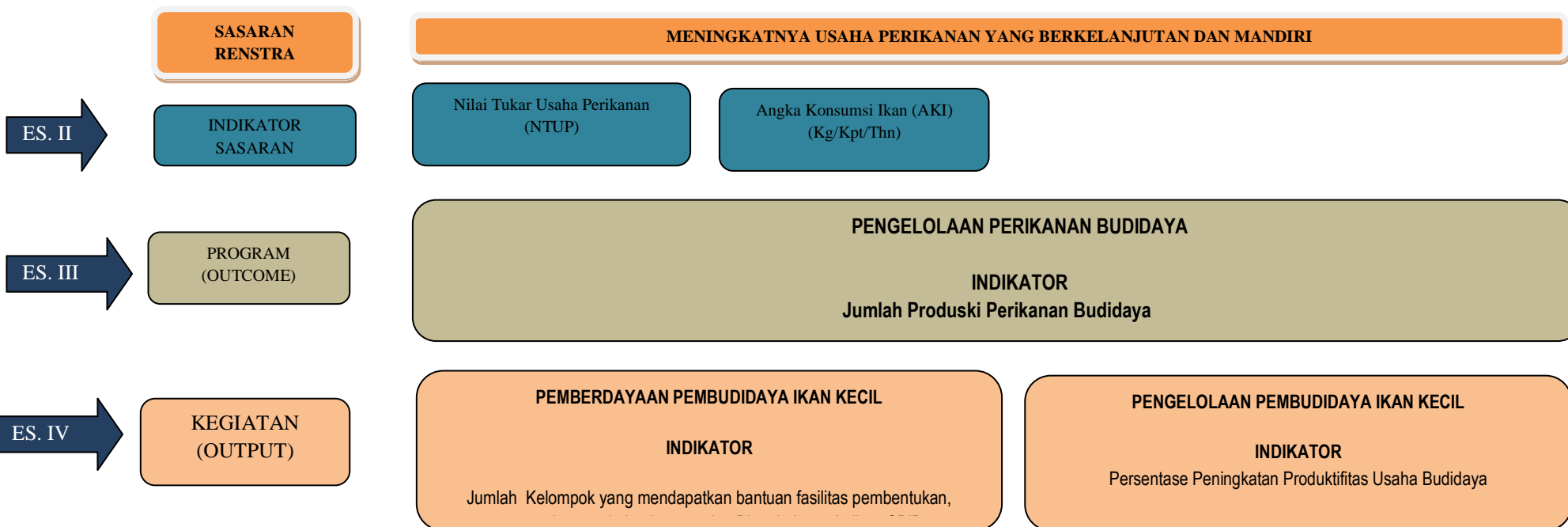
SASARAN RPJMD : Meningkatkan Perekonomian Kabupaten
INDIKATOR : Laju Pertumbuhan Ekonomi



Pohon Kinerja Sasaran Sektor Kelautan dan Perikanan
Bidang Perikanan Budidaya

SASARAN RPJMD : *Meningkatnya Perekonomian Kabupaten*

INDIKATOR : Laju Pertumbuhan Ekonomi



Selanjutnya target kinerja dari sasaran strategis pembangunan sektor perikanan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) pembangunan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama periode 2021 - 2026. Adapun target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 tersaji dalam tabel matrik sebagaimana berikut :

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi IKU	Tahun Dasar 2020	Target Kinerja, Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke-						Kondisi Akhir (Transisi)			
					1	2	3	4	5	6				
Urusan Pilihan : Kelautan dan Perikanan														
T.1	Terselenggaranya tata kelola perangkat daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	S.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	S.1.1.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Evaluasi Tim AKIP Daerah	68	70	71	72	73	74	75	75
T.2	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perikanan Berbasis Optimalisasi Sumberdaya dan Pemberdayaan Masyarakat	S.2	Meningkatnya Usaha Perikanan yang Berkelanjutan dan Mandiri	S.1.2.	Nilai Tukar usaha Perikanan (NTUP)	Nilai NTUP diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib), dimana komponen Ib hanya terdiri dari Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM). Dengan dikeluarkannya konsumsi dari komponen indeks harga yang dibayar petani (Ib)	109,77	>110	>111	>112	>113	>114	>115	>115
				S.1.3.	Angka Konsumsi Ikan (AKI) Daerah (Kg/Kpt/Thn)	Ketersediaan Ikan/Jumlah Penduduk Dimana : Ketersediaan ikan yang dimaksud didalamnya mencakup total produksi ikan (tangkap dan budidaya) ditambah impor dan stok, kemudian dikurangi dengan ekspor dan produksi ikan <i>non</i> pangan.	35,79	35,8	36,10	36,13	36,15	36,18	36,20	36,20

3.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja SKPD. Dinas Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai Tugas Pokok “melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang kelautan dan perikanan”. Selanjutnya untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai fungsi, yaitu :

- a. Perumusan kebijakan di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan tugas pokok dan fungsi masing-masing sekretariat dan Bidang di Lingkungan Unit Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung jabung Barat adalah sebagai berikut :

1) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, sekretaris mempunyai fungsi :

- 1) Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan;
- 2) Pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan keuangan meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan asset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, kerajinan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
- 3) Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- 4) Pengelolaan barang milik / kekayaan negara; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;

2) Bidang Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi di bidang perikanan tangkap.

Dalam melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang perikanan tangkap;
- 2) Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, bimbingan teknis kenelayanan pemantauan dan evaluasi sarana prasarana pemberdayaan nelayan kecil, kemitraan usaha nelayan, dan kelembagaan nelayan;
- 3) Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi perijinan, rekomendasi, pemungutan pajak dan retribusi, serta pengawasan dan pembinaan usaha perikanan tangkap;
- 4) Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengembangan dan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), sarana prasarana penangkapan ikan, pengawasan mutu hasil perikanan; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;

3) Bidang Perikanan Budidaya

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberdayaan, pengelolaan, pengembangan benih, penyediaan sarana dan prasarana, pencegahan, pengendalian hama dan penyakit ikan di bidang perikanan budidaya.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatas, Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja dibidang perikanan budidaya;
- 2) Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, bimbingan teknis budidaya ikan, pemantauan dan evaluasi cara pembesaran dan pembenihan ikan, serta pengembangan sarana dan prasarana budidaya ikan ;

- 3) Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, bimbingan teknis budidaya ikan, pemantauan dan evaluasi kemitraan usaha, pembinaan kelembagaan usaha pembudidayaan, pengembangan sarana dan prasarana usaha budidaya, dan promosi hasil perikanan budidaya;
- 4) Penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan kawasan budidaya perikanan, bimbingan teknis mutu pakan ikan, pencegahan hama penyakit ikan, pengawasan obat ikan, pencegahan hama penyakit ikan, pengawasan obat ikan, penyediaan data dan informasi pengelolaan air, lahan, kesehatan ikan, lingkungan dan pengembangan demplot percontohan budidaya ikan; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1. Struktur Organisasi

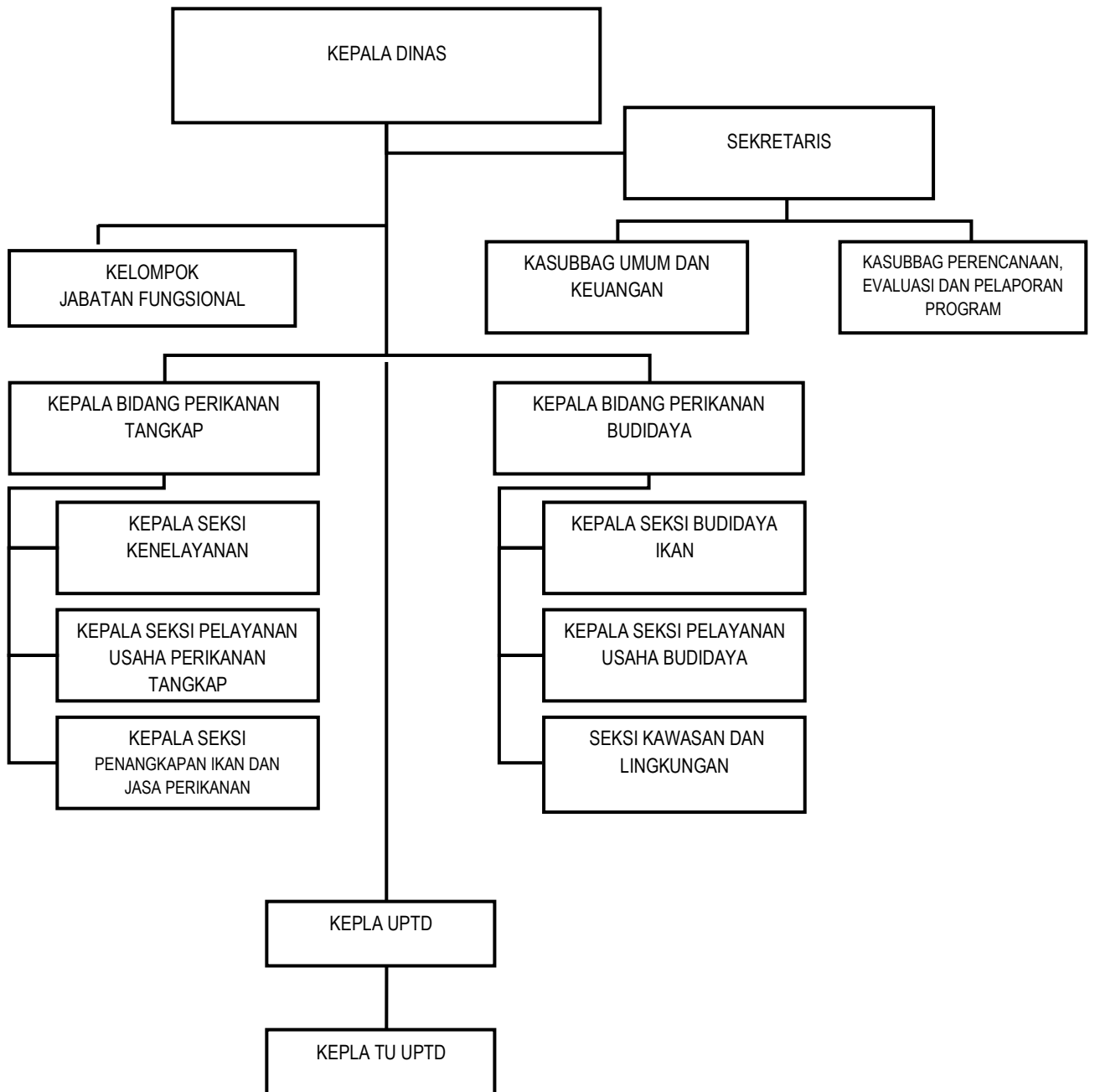
Bagian Tata Pemerintahan Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan unit Perangkat Daerah Dinas Perikanan yang ditetapkan dengan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan.

Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan dinas tipeologi C. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka susunan organisasi Bagian Tata Pemerintahan Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

1. 1 (satu) orang Kepala Dinas;
2. 1 (satu) orang Sekretaris;
3. 2 (dua) orang Kepala Bidang;
4. 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian;
5. 6 (enam) orang Kepala Seksi;
6. 1 (satu) Orang Kepala UPTD; dan
7. 1 (satu) Orang Kepala TU UPTD.

Setiap Bidang dibantu oleh staff/fungsional umum sebagai unsur teknis pelaksana. Selengkapny mengenai Susunan Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada Gambar 2.1. sebagai berikut :

Struktur Organisasi Dinas Perikanan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Kepegawaian

Berdasarkan Data Umum Kepegawaian (DUK) pada tahun 2020, Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai personil sebanyak 58 (lima puluh delapan) orang dengan susunan kepegawaian yang dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan, eselon dan status kepegawaian sebagai berikut :

- 1) Menurut Golongan Kepangkatan, Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. Golongan IV, sebanyak 3 Orang terdiri dari :
 - Golongan IV/c : 1 Orang
 - Golongan IV/b : 1 Orang
 - Golongan IV/a : 1 Orang
 - b. Golongan III, sebanyak 18 Orang terdiri dari :
 - Golongan III/d : 6 Orang
 - Golongan III/c : 6 Orang
 - Golongan III/b : 3 Orang
 - Golongan III/a : 3 Orang
 - c. Golongan II, sebanyak 3 Orang terdiri dari :
 - Golongan II/d : 3 Orang
 - Golongan II/c : 0 Orang
 - Golongan II/b : 0 Orang
- 2) Menurut Tingkat Pendidikan, Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. Pasca Sarjana (S2), sebanyak 1 Orang terdiri dari :
 - Master Science – M.Sc. : 1 Orang
 - b. Sarjana (S1), sebanyak 31 Orang terdiri dari :
 - Sarjana Perikanan : 16 Orang
 - Sarjana Ekonomi : 5 Orang
 - Sarjana Hukum : 1 Orang
 - Sarjana Pertanian : 3 Orang
 - Sarjana Peternakan : 1 Orang
 - Sarjana Pemerintahan : 1 Orang

- Sarjana Pendidikan : 1 Orang
 - Sarjana Komunikasi : 2 Orang
 - Sarjana Sosial : 1 Orang
- c. Sarjana Muda (Diploma/DIII) sebanyak 1 Orang
 - d. Sekolah Tingkat Menengah Sederajat sebanyak 19 Orang
- 3) Menurut Eselon, Pegawai Dinas Perikanan kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. Eselon II, sebanyak 1 Orang
 - b. Eselon III, sebanyak 3 Orang
 - c. Eselon IV, sebanyak 10 Orang
 - d. Non Eselon, sebanyak 44 Orang
 - 4) Menurut Status Kepegawaian, Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. PNS, sebanyak 24 Orang
 - b. Tenaga/Petugas Penunjang Kegiatan dengan Perjanjian (Kontrak) sebanyak 34 Orang

2.2.2. Aset/Modal

Dinas Perikanan kabupaten Tanjung Jabung Barat menempati tanah seluas 1.200 M² dengan luas bangunan 420 M² yang terdiri dari Gedung Utama Kantor, Ruang pertemuan dan Mushola. Sedangkan untuk menunjang kegiatan Administrasi Dinas Perikanan Kabupaten tanjung Jabung Barat didukung oleh fasilitas Komputer desktop/laptop sebanyak 22 Unit, Air Conditioner sebanyak 7 Unit, dan Printer sebanyak 24 Unit.

Fasilitas Kendaraan Dinas/Operasional yang ada sebanyak 21 Unit dengan rincian sebagai berikut :

- Kendaraan Roda 4 (empat) sebanyak 4 Unit
- Kendaraan Roda 2 (dua) sebanyak 21 Unit

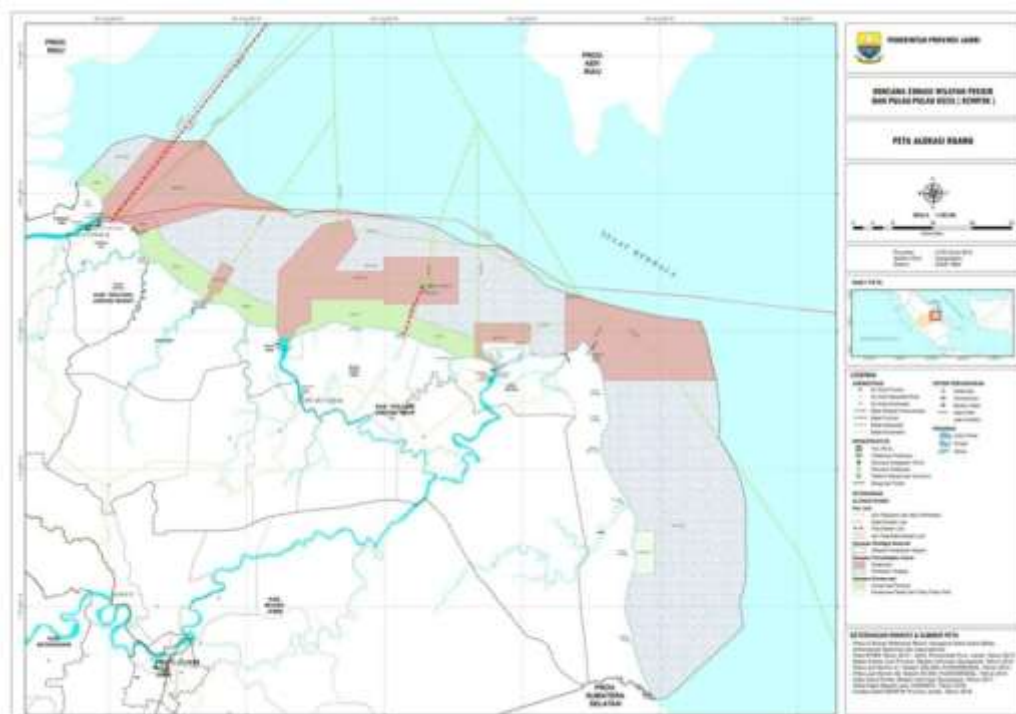
Selain itu Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai aset berupa Balai Perikanan Budidaya Air Tawar dan Air Payau sebanyak 1 Unit, penataan yang menempati tanah seluas kurang lebih 2 Ha. Keberadaan UPT BPATAP tersebut guna memenuhi kebutuhan benih ikan yang berkualitas, sebagai tempat pelatihan pembudidaya ikan dan pembinaan Unit Pembenihan Rakyat (UPR), Unit Percontohan Budidaya Air Payau (UPBAP) sebanyak 1 Unit yang menempati tanah seluas 5 Ha, keberadaan UPBAP ini guna menunjang percontohan dan

olah teknologi pengembangan budidaya air payau, Pabrik Es sebanyak 2 Unit, Show Room sebanyak 1 Unit dan asset-aset lain penunjang pengembangan pembangunan kelautan dan perikanan.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara geografis wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari Laut, Pantai rawa, dataran rendah dan dataran tinggi. Sebagaimana dari wilayah tersebut memiliki sumberdaya alam yang potensial untuk pengembangan usaha sektor kelautan dan perikanan. Wilayah yang potensial untuk usaha perikanan adalah wilayah perairan laut dengan kawasan pantai yang terbentang sepanjang 30,90 KM (Perda Provinsi Jambi Nomor 20 Tahun 2019) mulai dari Kecamatan Kuala Betara, Kecamatan Tungkal Ilir sampai Kecamatan Seberang Kota, dan beberapa wilayah Kecamatan di Kawasan Hулunya Potensial Pengembangan usaha perikanan air tawar.

Peta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP)



Kegiatan utama usaha sektor Kelautan dan Perikanan adalah perikanan tangkap, perikanan budidaya (tawar dan payau) dan usaha pengolahan hasil perikanan. Ketiga usaha tersebut memberikan kontribusi dalam penyediaan dan keragaman bahan pangan dari protein

hewani, dengan demikian pengembangan usaha penangkapan, budidaya dan pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat perlu mendapatkan perhatian yang cukup serius.

Perikanan Laut Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan secara umum laut Provinsi Jambi merupakan bagian dari Laut Cina Selatan, sehingga perhitungan potensi perikanan laut tidak terbatas pada potensi laut kewenangan Provinsi sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014, meliputi juga potensi pemanfaatan pada perairan lepas pantai Wilayah *pengelolaan perikanan 711* sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/Permen-KP/2016, bahkan ZEE Laut Cina Selatan. Potensi Perikanan Laut dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Laut provinsi : 77.980 Ton/Tahun
- b. Potensi pemanfaatan Laut Natuna dan ZEEI Laut Cina Selatan ± Satu Juta Ton/Tahun

Potensi lestari penangkapan ikan perairan umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat diperkirakan sebesar 1.000 ton/tahun yang tersebar di tiga sungai besar yaitu Sungai Pengabuan, Sungai Betara dan Sungai Pangkal Duri yang merupakan perbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta anak-anak sungai ketiga sungai tersebut dan rawa-rawa pada kawasan basah.

Potensi pengembangan tambak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat seluas 5.000 Ha dan tersebar di Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Seberang Kota dan Kecamatan Kuala Betara. Kondisi lahannya maupun perairan pantainya cukup baik untuk pengembangan air payau, seperti ikan bandeng, kakap, Bawal, udang dan kepiting.

Komoditas budidaya tambak mempunyai nilai ekonomis tinggi, oleh karena itu pengembangan budidaya tambak harus dibangkitkan kembali dengan dukungan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, seperti tanggul, jalan produksi dan listrik.

Potensi budidaya kolam di Kabupaten Tanjung Jabung Barat diperkirakan 2.000 Ha yang tersebar di Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Betara, Kecamatan Pengabuan, Kecamatan Tungkal Ulu dan Kecamatan Renah Mendaluh, Kecamatan Muara papalik dan Kecama Tebing Tinggi. Pada sub kawasan basah cocok untuk pengembangan budidaya ikan yang lebih toleran terhadap perubahan salinitas seperti ikan nila, patin dan ikan-ikan lokal lainnya.

Sejalan dengan semakin besarnya permintaan benih ikan, di beberapa tempat mulai terdapat UPR (Unit Pembenihan Rakyat) ikan. Unit pembenihan rakyat ini berfungsi sebagai penyedia kebutuhan benih bagi pembudidaya ikan. Namun demikian, benih yang dihasilkan tersebut belum optimal dalam memenuhi permintaan baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya, sehingga para pembudidaya ikan masih banyak yang mencari benih keluar daerah.

Balai Benih Ikan (BBI) yang sekarang telah berkembang menjadi UPT Dinas Perikanan, mempunyai tugas untuk membina UPR dan memenuhi ketersediaan benih bagi masyarakat pembudidaya air tawar baik di dalam daerah maupun di luar daerah. Kedepan pembangunan Balai Benih Ikan (BBI) diarahkan di daerah ulu, dikarenakan keberadaan BBI yang ada sekarang belum bisa memenuhi kebutuhan benih dalam daerah.

Potensi budidaya ikan dalam Keramba di Kabupaten Tanjung Jabung Barat seluas 1.000 Ha (10.000 unit) terutama di Kecamatan Tungkal Ulu, Kecamatan Merlung, Batang Asam, Pengabuan, Betara dan Bram Itam. Komoditas Ikan yang cocok dikembangkan dalam Keramba adalah Nila, Lele dan Patin (Kecamatan Pengabuan dan Betara) sedangkan untuk ikan yang tidak mempunyai kemampuan adaptasi tinggi cocoknya dikembangkan di Daerah Ulu, seperti Kecamatan Tungkal Ulu, Batang Asam, dan Kecamatan Merlung.

Potensi Pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih sangat potensial untuk dikembangkan, hal ini didukung dengan adanya Sentra Pengolahan Hasil Perikanan yang terus dikembangkan, dengan harapan produk hasil olahan perikanan semakin beragam dan inovatif, sehingga dapat meningkatkan penghasilan masyarakat, sekaligus meningkatkan PAD Kabupaten.

Potensi yang ada diperkirakan sekitar 18.000-20.000 ton/tahun yang bisa dimanfaatkan, karena dengan beragamnya hasil olahan perikanan bisa member nilai tambah, baik dari segi kualitas, kuantitas dan harga jual.

Semua potensi tersebut diatas didukung dengan cukup besarnya jumlah pelaku usaha perikanan (nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah dan Pemasar) di Daerah, dimana besaran jumlah pelaku usaha perikanan dapat di rinci sebagai berikut :

Jenis Usaha Perikanan sampai dengan Tahun 2020

No	Jenis Usaha	Jumlah
1.	Nelayan (Perairan Laut dan Umum)	3.234 Orang
2.	Pembudidaya Ikan/Udang	1.252 Orang
3.	Kelompok Pengolah	116 Kelompok
4.	Pemasar Hasil Perikanan	105 Orang

Sedangkan jumlah kelompok menurut kelas (pemula dan madya (Berbadan Hukum)) dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini :

Jumlah Kelompok Usaha Perikanan sampai dengan Tahun 2020

No	Jenis Usaha	Jumlah	Pemula	Madya (Berbadan Hukum)
1.	Nelayan (Perairan Laut dan Umum)	254	216	38
2.	Pembudidaya Ikan/ Udang	114	103	11
3.	Pengolah dan Pemasar	116	110	6

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah rangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis berdasarkan isu-isu strategis sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Dengan demikian, maka program dan kegiatan untuk tahun 2021-2026 ini, penyusunan program dan kegiatan pembangunan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan terus berlanjut dan diprioritaskan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Program menjadi instrumen untuk menentukan sasaran yang diproyeksikan dengan memanfaatkan sumberdaya dan sumber dana tertentu. Program serta kegiatan-kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut :

A. PROGRAM RUTIN

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan untuk peningkatan Administrasi Perkantoran

Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - Penyediaan Bahan Logistik kantor;
 - Penyediaan barang cetak dan penggandaan;
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 - Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
- Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik;
 - Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor;
 - Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor.
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya.

B. PROGRAM TEKNIS (URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN)

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini diarahkan untuk Penyediaan Data dan Informasi Perikanan Tangkap, Peningkatan Produksi Penangkapan dan Pembinaan Pelaku Usaha Perikanan Tangkap.

Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan :

- a. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
- Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan;
 - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap;

- Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap.
- b. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
 - Pengembangan Kapasitas Nelayan;
 - Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil.

2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini diarahkan untuk Penyediaan Data dan Informasi Perikanan Budidaya, Peningkatan Produksi Budidaya dan Benih serta Pembinaan dan Perencanaan Pengembangan Budidaya Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan :

- a. Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil, dengan Sub Kegiatan :
 - Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil;
 - Pembinaan, Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.
- b. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, dengan Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Data dan Informasi Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota;
 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota;
 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota;
 - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota;
 - Perencanaan, Pengembangan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan di Darat.

4. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Program ini diarahkan untuk Kegiatan Pengawasan dan Perlindungan Kawasan Konservasi Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan :

- a. Pembinaan Usaha dan Pemasaran Hasil Perikanan. Dengan Sub Kegiatan :
 - Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang diusahakan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

5. Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini diarahkan untuk Penyediaan Data dan Informasi Pengolahan dan Pemasaran serta Pembinaan Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Pembinaan dan Promosi.

Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan :

- a. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil, dengan Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.
- b. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil, dengan Sub Kegiatan :
 - Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan dan Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
- c. Penyediaan dan Penyediaan Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
 - Pemberiaan Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

BAB IV PENUTUP

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2021 diharapkan dapat dijadikan acuan dalam mengukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dinas, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang baik diwujudkan oleh para pejabat sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, dengan Indikator Kinerja Utama ini diharapkan para pimpinan instansi tidak hanya mengelola anggaran saja, akan tetapi pimpinan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Mudah-mudahan Indikator Kinerja Utama ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.

**“Perencanaan yang baik bukan berarti segala-galanya, Tetapi
Tanpa perencanaan yang baik, segala-galanya menjadi tidak berarti”**

Kuala Tungkal, September 2021

KEPALA DINAS



Ir. NETTY MARTINI, M.Sc.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650913 199703 2 001

